

**LSM BADAK Soroti SILPA
Rp477 Miliar, Siap Laporkan
Kemenkeu-Kemendagri**

**Perkuat Pendidikan
Al-Qur'an, PGN-KB Gelar
Bimtek Ratusan Guru Ngaji**

**Kasus Titik SPPG: Cermin
Buram Kekuasaan
di Tulungagung**

MEDIA ONLINE & CETAK

Since 2009

Pendiri
IKMAL DAVID PERMANA (AIM)

SPJNEWS.id
INFORMASI AKTUAL, TERPERCAYA, DAN BERIMBANG

TAHUN XIII | EDISI-132 | AGUSTUS - SEPTEMBER 2026 - 1448 H

Website: spjnews.id | Email: spjnews.spj@gmail.com

Rp. 15.000

Rp147 Juta untuk Smart TV SMAN Bareng Disorot Publik

JOMBANG | SPJNEWS.ID- Rencana pengadaan Smart TV 55 inci di SMAN Bareng, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, menjadi perhatian publik setelah tercatat dalam Rencana Umum Pengadaan (RUP) dengan nilai pagu mencapai Rp147.384.000.

Paket tersebut tercatat dengan Kode RUP 64609704 pada Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Jombang, dengan lokasi pekerjaan SMAN Bareng. Anggaran bersumber dari APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2026.

Dalam data RUP, pengadaan masuk paket Belanja Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) dan mencantumkan spesifikasi televisi 55 inci Smart TV. Metode pengadaan direncanakan melalui E-purchasing, dengan tahapan pemilihan penyedia hingga pemanfaatan barang dijadwalkan pada September 2026.

Besarnya pagu tersebut me-



munculkan sejumlah pertanyaan dari masyarakat, terutama mengenai berapa unit televisi yang akan dibeli, harga satuan, spesifikasi teknis, lokasi pemasangan, serta

urgensi pengadaan bagi proses pendidikan.

Volume 1 Tidak Otomatis Satu Unit Data RUP mencantumkan volume pekerjaan sebanyak 1. Na-

mun, angka tersebut merupakan volume paket pengadaan dan tidak otomatis menunjukkan jumlah unit televisi yang akan dibeli.

● KE HALAMAN 11



Dedi Mulyadi Berantas Tramadol

BANDUNG | SPJNEWS – Pemerintah Provinsi Jawa Barat berkomitmen memberantas peredaran gelap obat-obatan keras tertentu (OKT), termasuk tramadol. Langkah ini dilakukan karena sejumlah wilayah di Jawa Barat mulai menjadi titik rawan peredaran obat terlarang, minuman keras, dan zat adiktif berbahaya lainnya.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan, peredaran barang-barang tersebut tidak boleh dibiarkan. Ia meminta masyarakat tidak takut atau bersikap apatis terhadap para pengedar.

Menurut Dedi, rasa takut justru dapat membuat para pelaku semakin leluasa menjalankan aksinya. Karena itu, masyarakat perlu berani melawan dan bersama-sama mencegah peredaran obat keras di lingkungan masing-masing.

● KE HALAMAN 11

Polres Garut Dalam Penyalahgunaan BBM Bersubsidi

GARUT | SPJNEWS – Polres Garut masih mendalami kasus dugaan penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di wilayah pelosok Kecamatan Cibalong, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Penyidikan dilakukan untuk mengungkap pihak-pihak yang terlibat dalam kasus tersebut.

Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Garut AKP Herman Saputra mengatakan, penyidik masih melengkapi berkas perkara sekaligus mendalami dugaan penyalah-

gunaan BBM bersubsidi.

Kasus tersebut terungkap setelah polisi menerima informasi dari masyarakat mengenai dugaan penyalahgunaan BBM bersubsidi jenis Pertalite di wilayah selatan Garut, tepatnya Kecamatan Cibalong.

Menindaklanjuti informasi itu, tim Satreskrim Polres Garut melakukan penyelidikan dan menangkap seorang pria berinisial AC (38), warga Kabupaten Tasikmalaya, di wilayah Cibalong pada Sela-

sa (11/8) malam lalu. AC kini telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Mapolres Garut untuk menjalani proses hukum.

Dari penindakan tersebut, polisi mengamankan 16 jeriken berisi Pertalite dengan kapasitas masing-masing 15 liter.

Selain itu, petugas turut menyita sebuah telepon seluler dan kendaraan roda empat yang diduga digunakan untuk mengangkut BBM tersebut.

● KE HALAMAN 11





JANGAN PUAS Menangkap Ikan Kecil

Oleh: **Kusmawan**

Setiap kali aparat menggelar konferensi pers, publik disuguhi tumpukan barang bukti, deretan tersangka, dan klaim keberhasilan memberantas narkoba. Namun, pertanyaan yang terus menggema adalah: mengapa yang tertangkap hampir selalu pemain lapangan, sementara aktor utama jaringan narkoba seolah tak pernah habis?

Memang, menangkap pengguna, kurir, dan pengedar adalah bagian penting dari penegakan hukum. Namun, jika operasi hanya berputar pada pelaku di lapisan terbawah, pemberantasan narkoba berisiko menjadi rutinitas tanpa penyelesaian.

Kurir dipenjara, pengedar kecil ditangkap, tetapi jaringan tetap hidup karena sumber kendali dan pendanaannya belum benar-benar diputus.

Masyarakat tentu mengapresiasi setiap upaya aparat dalam memerangi narkoba. Namun apresiasi tidak boleh menghapus ruang untuk bertanya secara kritis.

Mengapa bandar besar dan pengendali jaringan jauh lebih jarang

terungkap? Apakah hambatan utamanya adalah keterbatasan pembuktian, kompleksitas jaringan, atau faktor lain yang perlu dijelaskan secara terbuka kepada publik? Pertanyaan-pertanyaan ini wajar diajukan dalam negara yang menjunjung transparansi dan akuntabilitas.

Keberhasilan perang melawan narkoba tidak semestinya diukur dari banyaknya orang yang ditangkap, melainkan dari sejauh mana jaringan kriminal berhasil dilumpuhkan.

Jika setiap tahun angka penangkapan terus meningkat, tetapi peredaran narkoba tetap marak, masyarakat berhak mempertanyakan efektivitas strategi yang dijalankan.

Bandar besar bukan hanya menjual narkoba. Mereka menggerakkan aliran uang, merekrut kurir, membangun jaringan distribusi, dan mencari celah agar bisnis haram terus berjalan. Selama simpul utama itu tidak diputus, penangkapan pelaku lapangan hanya

akan menciptakan ruang bagi pelaku baru untuk menggantikannya.

Sudah saatnya orientasi pemberantasan narkoba bergeser dari sekadar mengejar kuantitas penangkapan menuju pengungkapan jaringan secara menyeluruh. Penelusuran aliran dana, pembongkaran jaringan lintas daerah maupun lintas negara, serta penindakan terhadap aktor intelektual harus menjadi ukuran utama keberhasilan.

Publik tidak membutuhkan sekadar tontonan konferensi pers yang berulang. Publik membutuhkan hasil nyata: jaringan yang benar-benar runtuh, aset hasil kejahatan yang disita, dan para pengendali bisnis narkoba yang dibawa ke hadapan hukum.

Perang terhadap narkoba akan memperoleh kepercayaan penuh masyarakat apabila penegakan hukum dilakukan secara konsisten, profesional, dan tanpa pandang bulu.

Sebab, keadilan bukan hanya tentang menghukum mereka yang mudah ditangkap, melainkan juga tentang memastikan bahwa siapa pun yang terbukti berada di balik kejahatan—tanpa memandang posisi atau pengaruhnya—diproses sesuai hukum yang berlaku.

Jika yang terus tertangkap hanya ikan kecil, sementara dugaan aktor besar tetap berada di luar jangkauan, maka publik akan terus mempertanyakan: apakah kita sedang memutus rantai peredaran narkoba, atau sekadar memangkas ujungnya? ***

Diterbitkan Berdasarkan Undang-Undang
 Nomor: 40 Tahun 1999 Tentang Pers, oleh:

PT. SURYA GAMA ABADI

S.K. KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
 REPUBLIK INDONESIA

AHU-A110341.AH.01.30.Tahun 2026

NPWP: 100000010662846

NIB: 0608260424496

REKENING BJB: 0162647253100 A.n PT. SURYA GAMA ABADI

Pembina : Muhammad Hudin, SPd
 Moch. Fauzan Rachman, Se (Non Aktif)

Pendiri : Ikmal David Permana (Alm) - Ag Suhendra
Penanggungjawab/Pemimpin Redaksi: Ag Suhendra
Wakil Cabang Pemimpin Perusahaan Jawa Timur:

Asep Yumarwoko. St. MM

Redaktur Pelaksana: Kusmawan

Redaktur: Ajang Pendi

It/Admin : W. Setiawan

Konsultan Hukum : Herman. Sh, Asep Mulyana. Sh, Deny Kuswandy. Sh, Sayyid M Iqbal Rahman. Sh., M.h

DEWAN REDAKSI : Kusnandar, Budiyo, Herman. Sh, Ajang Pendi, Moch. Mansyur, H. Moch. Salifi Rachman, Ari Wibiksana, Se, Apip Saripudin, Sarief Hidayat. Se, Aris, Bang Ana

KAB. BANDUNG: Herman. Sh, Tonny Adam, Bangbang, M. Jajang Suryana, Nurhalim Ismail. Sh Bandung Barat : Herman. Sh

KOTA BANDUNG : H. Moch. Salifi Rachman, Nandar, Haris Nugraha, Donni, Asep Solihin, Muhadi Rohman.

PROPINSI JABAR: Iwan Hermawan, Dedi Setiadi, Herman, Sh

BIRO GARUT : Ugan Sugandi (Kabiro), Ajang Pendi, H. Iwan Setiawan, Pupu Abdul Latief, Tendi Juharman (Biro Redaksi: Jl. Bra-tayudha-Galumpit Rt.02/26 Kel. Kota Kulon Kec. Garut Kota Tlp. 081394288233)

BIRO BANDUNG TIMUR : Daud
BIRO CIAMIS-PANGANDARAN: Endang Koswara, S. Ip
BIRO SUKABUMI : Yoga Danis (Kabiro)
BIRO MAJALENGKA : Maman Sarman
BIRO CILEGON : Muslimin (Ka. Biro)
BIRO SERANG BANTEN : Wahyudin (Kabiro), Ade Supriyana
BIRO KAB. LEBAK : Udas Suryana (Kabiro)
BIRO TANGERANG SELATAN : Iwan Sutisna
BIRO PROPINSI JAWA TIMUR: Asep Yumarwoko. St. Mm, (Kabiro) Moch. Hasan Musri, (Kabiro), Sari
BIRO MADIUN: Isnandar, Muji Hartono, Bambang, Pugu Yuhana
BIRO KAB. TULUNGAGUNG : Mualimin, (Kabiro)
BIRO KAB. MOJOKERTO: Syaiful Bakhti, (Kabiro)
BIRO KAB. NGANJUK : Alfian Saroni (Kabiro), Edi Yulianto Tri Prayitno

BIRO MADURA: Fendi Riyanto (Kabiro), Abdullah, S.si. (Kabiro Pa-mekasan)

BIRO KAB. PACITAN: Suprpto
BIRO KAB. GRESIK : Muhammad Hudin (Kabiro), Endah Lelyani, M. Tarsan, Muhammad Hariyanto, Abdul, Bang Doel

BIRO SIDOARJO : Sari
BIRO JOMBANG : Ratno Hadi (Kabiro), Diana Kholidah
BIRO PROPINSI JAWA TENGAH : Sugeng Riyanto (Kabiro)
BIRO KAB. WONOGIRI: Yayak Nurmanto (Kabiro)
BIRO KOTA MAKASSAR : Ir. Walinono Haddade (Kabiro)

BIRO SULUT : Howard Hendriek Marius
BIRO SULAWESI SELATAN: Drs. Sadikin. S (Kabiro), Jufri, Moch. Sulaiman, Nurdin. Se, Haruna Hambali. Spd
BIRO KAB. GOWA : Abd Aziz. Se (Kabiro), Riswanto. Ssos, Muh. Jafar, Safriah. S. Korn, Samsunar Alam

KOORDINATOR BIRO SULAWESI SELATAN: Haenumar Karaeng Muang

BIRO KAB.TAKALAR: Rahim. Dg Sua (Kabiro)

BIRO PALEMBANG: Hartoni (Kabiro)

BIRO PROVINSI ACEH : M. Chairullah (Kabiro)

REDAKSI/TATA USAHA:

Jl. Lamajang 2 Zypur Dayeuhkolot Kab. Bandung

PERWAKILAN: Kab. Bandung: Jl. St. Barat Banjaran No. 138
 Banjaran Bandung 40377 Tlp. 085221397120 – 0895601616189
 Email:redaksi@spjnews.id - Website:spjnews.id

Partai NasDem Tulungagung Terancam Ditinggalkan Partisan Polemik Kursi Wakil Ketua DPRD Jadi Sorotan

SPJNEWS.ID | TULUNGAGUNG – Polemik penentuan kursi Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tulungagung dari Partai NasDem menuai kekecewaan di kalangan sebagian kader dan partisan.

Persoalan tersebut mencuat setelah Sabar, anggota DPRD Kabupaten Tulungagung dari daerah pemilihan (dapil) 5, yang meraih 11.128 suara, tidak menempati posisi Wakil Ketua DPRD. Jabatan tersebut justru ditempati Yody Wirawan dari dapil 6, yang memperoleh 5.654 suara dan juga menjabat sebagai Ketua DPD Partai NasDem Tulungagung.

Persoalan ini kemudian berkembang menjadi perdebatan mengenai mekanisme internal partai dalam menentukan posisi pimpinan DPRD.

Bagi sebagian pendukung Sabar, perolehan suara yang jauh lebih besar dinilai semestinya menjadi salah satu pertimbangan penting dalam menentukan representasi politik di lembaga legislatif.

Kekecewaan tersebut disampaikan Suwandi, salah satu partisan Partai NasDem. Ia menilai Sabar merupakan figur yang selama ini dekat dengan masyarakat dan aktif memberikan pelayanan kepada konstituennya.

Menurut Suwandi, Sabar dikenal karena sejumlah kegiatan sosial, antara lain menyediakan ambulans untuk membantu masyarakat serta memperjuangkan aspirasi melalui pokok-pokok pikiran (pokir) anggota DPRD. Ia juga menilai Sabar tidak menjaga jarak dengan masyarakat yang telah memberikan dukungan politik kepadanya.

"Yang kami kecewakan adalah suara masyarakat seolah tidak menjadi pertimbangan utama," ujar Suwandi.

Bagi para pendukung Sabar, persoalan tersebut bukan semata-mata mengenai siapa yang mendapatkan jabatan, melainkan menyangkut bagaimana aspirasi dan mandat masyarakat dihargai



setelah proses pemilu selesai.

Kekecewaan itu bahkan memunculkan wacana penarikan dukungan terhadap Partai NasDem pada pemilu mendatang.

Suwandi bersama sejumlah partisan mengaku akan mempertimbangkan kembali dukungan politik mereka jika persoalan tersebut tidak mendapatkan penjelasan dan penyelesaian yang dianggap adil.

Meski demikian, penentuan

pimpinan DPRD pada dasarnya tidak hanya ditentukan oleh jumlah suara individu caleg, tetapi juga berkaitan dengan mekanisme internal partai serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Karena itu, polemik ini semestinya dijelaskan secara terbuka agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah kader maupun masyarakat.

Bagi Partai NasDem Tulungagung, polemik tersebut menjadi uji-

an tersendiri untuk menjaga soliditas internal sekaligus kepercayaan konstituen.

Perbedaan pandangan mengenai jabatan politik merupakan hal yang mungkin terjadi dalam organisasi, tetapi komunikasi yang terbuka dan transparan diperlukan agar kekecewaan tidak berkembang menjadi konflik yang lebih luas.

Pertanyaannya kini, mampukah Partai NasDem Tulungagung memberikan penjelasan yang dapat diterima para pendukung Sabar? Ataukah polemik kursi Wakil Ketua DPRD ini justru akan berdampak pada dukungan politik mereka pada pemilu mendatang?

Dinamika politik lokal menunjukkan bahwa suara dan sikap konstituen tidak berhenti setelah pemilu usai. Ketika sebagian pendukung merasa aspirasinya tidak terakomodasi, keputusan politik mereka pada pemilu berikutnya bisa menjadi konsekuensi yang harus diperhitungkan. ● Muallimin

LSM BADAQ Soroti SILPA Rp477 Miliar, Siap Laporkan Kemenkeu-Kemendagri

TULUNGAGUNG | SPJNEWS.ID- Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Pemerintah Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp477 miliar menjadi sorotan dalam rapat dengar pendapat yang digelar di Graha Wicaksana DPRD Tulungagung, Rabu (5/8/2026) lalu.

Dalam forum tersebut, anggota DPRD Tulungagung, Ali Munip, menyampaikan bahwa pihak legislatif hanya menerima catatan administratif terkait SILPA tersebut dan belum dapat memastikan keberadaan riil dana dimaksud.

"DPRD hanya memiliki catatannya saja dan tidak mengetahui secara pasti apakah uang tersebut benar-benar ada atau tidak," ujar Ali Munip.

Pernyataan tersebut memunculkan pertanyaan mengenai besarnya SILPA di tengah masih banyaknya kebutuhan pembangunan daerah yang belum terpenuhi. Sejumlah pihak menilai kondisi tersebut perlu dijelaskan secara terbuka agar tidak menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat.

Ketua LSM BADAQ, Suwandi, menilai persoalan ini menunjukkan



perlunya penguatan fungsi pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah. Menurutnya, dana sebesar Rp477 miliar merupakan uang rakyat yang harus dipertanggungjawabkan secara transparan.

"Yang lebih mengherankan, DPRD ternyata hanya mendasarkan pada catatan dan keterangan TAPD, tanpa mengetahui realitas apakah dana SILPA tersebut benar-benar tersedia," tegas Suwandi.

Atas dasar itu, LSM BADAQ me-

nyatakan akan melaporkan persoalan tersebut kepada Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri untuk meminta evaluasi lebih lanjut terhadap pengelolaan keuangan daerah.

"Kami sudah tidak percaya pada BPK. Karena itu, kami akan membawa persoalan ini ke Kemenkeu dan Kemendagri agar dilakukan evaluasi secara menyeluruh," kata Suwandi.

Soroti Perbedaan Nilai SILPA

LSM BADAQ juga menyoroti adanya perbedaan nilai SILPA yang tercatat dalam dua dokumen. Dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Februari 2026, SILPA disebut sebesar Rp305 miliar. Sementara dalam Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, nilainya tercatat mencapai Rp477 miliar.

Perbedaan sebesar Rp172 miliar tersebut, menurut LSM BADAQ, perlu mendapatkan penjelasan

resmi dari pemerintah daerah. Mereka mempertanyakan apakah selisih tersebut disebabkan oleh mekanisme pencatatan akuntansi atau terdapat faktor lain yang perlu diklarifikasi.

Dalam rapat dengar pendapat juga disebutkan bahwa dana pada Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) tidak hanya berada dalam satu rekening, melainkan tersebar pada sejumlah rekening bendahara dan program, termasuk Bantuan Operasional Kesehatan (BOK). Kondisi tersebut dinilai memerlukan pengawasan yang ketat agar pengelolaannya tetap akuntabel dan tidak menimbulkan potensi penyimpangan.

LSM BADAQ menegaskan bahwa persoalan SILPA bukan hanya berkaitan dengan administrasi keuangan, tetapi juga menyangkut akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.

Menurut mereka, setiap penggunaan maupun sisa anggaran daerah harus dapat dijelaskan secara terbuka kepada publik sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan negara.

● Muallimin

KDS Serahkan Kartu BPJS Ketenagakerjaan untuk 94 OKP dan PK KNPI Se-Kab.Bandung

KAB BANDUNG | SPJNEWS – Bupati Bandung Dadang Supriatna atau yang akrab disapa Kang Dadang Supriatna (KDS), kembali menunjukkan komitmen dan perhatiannya kepada kalangan pemuda di Kabupaten Bandung.

Komitmen nyata dalam mengapresiasi peran pemuda tersebut diwujudkan melalui langkah konkret berupa penyerahan kartu kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan sebagai tanda resmi menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan.

KDS secara simbolis menyerahkan Kartu Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan kepada jajaran Ketua, Sekretaris, dan Bendahara (KSB) dari 94 Organisasi Kemasayarakatan Pemuda (OKP) serta Pengurus Kecamatan (PK) KNPI se-Kabupaten Bandung.

"Dengan terdapatnya para pengurus inti tersebut, seluruh risiko kerja yang berpotensi terjadi saat menjalankan tugas organisasi kini dapat diantisipasi dan ditanggung oleh negara melalui program jaminan sosial," ungkap Bupati KDS dalam acara Sosialisasi BPJS Ketenagakerjaan di Kampung Bedas, Sapan, Desa Tegalluar, Kecamatan Bojongsong, Kamis (13/8/2026) lalu.

Acara Sosialisasi BPJS Ketenagakerjaan untuk para pemuda ini digagas oleh Anggota Komisi IX



DPR RI Fraksi PKB, Asep Romy Romaya. Hadir pula Bupati Bandung KDS, jajaran Forkopimda, Ketua Karang Taruna Kabupaten Bandung Ruli Yuliana dan Ketua KNPI Kabupaten Bandung Rifki Fauzi.

Hadir pula Sekretaris MPI DPD KNPI Kabupaten Bandung sekaligus kandidat kuat calon Pimpinan DPD KNPI Jawa Barat periode 2026-2029, Bung Ramdhan Fauzan Adhiman (RF). Tampak hadir pula para kepala dinas, oora camat dan para tokoh pemuda dari 31 kecamatan.

Penyerahan kartu kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan ini menjadi bukti nyata komitmen pemerintah daerah dalam memastikan para penggerak organisasi pemuda



memiliki jaminan perlindungan sosial saat berkontribusi membangun daerah.

Bupati KDS menjelaskan, melalui pemberian jaminan sosial tersebut, para tokoh pemuda tidak hanya mendapatkan pengakuan atas dedikasinya, melainkan juga rasa aman saat memimpin dan menjalankan berbagai program kemasyarakatan.

"Perlindungan BPJS Ketenagakerjaan bagi para pemuda ini mencakup Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) hingga Jaminan Kematian (JKM), yang memberikan kepastian perlindungan finansial bagi diri maupun keluarga pengurus," tambah KDS.

Kegiatan sosialisasi ini sekaligus menjadi momentum agar para pemuda lebih memahami manfaat dan hak yang didapatkan dari kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, mulai dari perlindungan kecelakaan kerja hingga jaminan hari tua.

Diharapkan pula para pengurus OKP dan KNPI dapat menjadi agen penyebar informasi, mengajak lebih banyak lagi pemuda di wilayahnya untuk turut terdaftar dalam program perlindungan sosial ini.

Selain itu, dukungan nyata terhadap jajaran 94 KSB OKP dan PK KNPI ini diharapkan mampu memacu semangat konsolidasi serta efektivitas gerakan pemuda di seluruh

penjuru Kabupaten Bandung.

Sinergi antara pemerintah daerah, badan penyelenggara jaminan sosial, dan wadah berhimpun kepemudaan ini dinilai sebagai langkah progresif dalam berkontribusi membangun Kabupaten Bandung ke depan.

Para pengurus yang menerima kartu menyambut baik langkah Pemkab Bandung tersebut. Mereka mengapresiasi perhatian nyata Bupati KDS yang tidak hanya mengajak bergerak dan berkontribusi, tetapi juga memastikan keselamatan dan perlindungan para pemuda yang mengabdikan untuk masyarakat Kabupaten Bandung.

● SPJ-04

Perubahan APBD Jombang 2026: SILPA Naik Rp332,37 Miliar

JOMBANG | SPJNEWS.ID – Pemerintah Kabupaten Jombang menyampaikan Nota Penjelasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 dalam Sidang Paripurna DPRD Jombang.

Perubahan APBD disusun dengan mempertimbangkan perkembangan ekonomi, kinerja anggaran tahun berjalan, penerimaan daerah, serta SILPA Tahun Anggaran 2025. Arah pembangunan Jombang 2026 mengusung tema "Penguatan Pondasi Transformasi Bidang Strategis."

Empat prioritas pembangunan yang diusung meliputi peningkatan kualitas sumber daya manusia, kemandirian desa dan ke-

hidupan masyarakat yang harmonis, penguatan tata kelola pemerintahan, serta peningkatan infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan kualitas lingkungan hidup.

Transfer Daerah Turun Rp154,46 Miliar

Dalam rancangan perubahan APBD, pendapatan transfer diproyeksikan sebesar Rp1,773 triliun, turun dari sebelumnya Rp1,928 triliun.

Penurunan mencapai Rp154,46 miliar atau 8,01 persen. Pendapatan transfer dari pemerintah pusat diproyeksikan sebesar Rp1,632 triliun, sementara transfer antar daerah meningkat menjadi Rp141,45 miliar

dari sebelumnya Rp135,02 miliar.

Pada sisi PAD, retribusi daerah diproyeksikan naik menjadi Rp455,95 miliar, sedangkan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan menjadi Rp12,67 miliar.

SILPA 2025 Naik Jadi Rp332,37 Miliar

Komponen pembiayaan daerah juga mengalami perubahan signifikan. SILPA Tahun Anggaran 2025 yang menjadi sumber penerimaan pembiayaan tercatat sebesar Rp332,37 miliar, meningkat dari sebelumnya Rp131,74 miliar.

SILPA tersebut digunakan untuk menutup defisit anggaran sehingga rancangan perubahan APBD 2026 tetap dalam kondisi berim-



bang. Sementara itu, Belanja Tidak Terduga turun menjadi Rp8,94 miliar, sedangkan Belanja Transfer turun dari Rp560,47 miliar menjadi sekitar Rp428,99 miliar.

Pemkab Jombang menegas-

kan bahwa setiap rupiah anggaran merupakan amanah publik yang harus diarahkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.

● Ratno

:: 17 Desa di Kecamatan Boyolangu Hanya 10 Desa Dirikan Koperasi Merah Putih

TULUNGAGUNG | SPJNEWS.ID- Program pemerintah untuk membentuk Koperasi Merah Putih di setiap desa bertujuan memperkuat perekonomian masyarakat dari tingkat desa. Namun, pelaksanaannya di Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, tidak berjalan sepenuhnya sesuai target. Hingga saat ini, dari 17 desa yang ada, baru 10 desa yang telah mendirikan Koperasi Merah Putih, sedangkan 7 desa lainnya belum membentuk koperasi. (Jumat, 7 Agustus 2026) lalu.

Kepala Desa Tanjungsari, Sanindra Bayu Pradana, menjelaskan bahwa keputusan tersebut bukan karena kurangnya dukungan terhadap program pemerintah, melainkan



kan disebabkan keterbatasan lahan yang tersedia.

"Di wilayah kami banyak lahan hijau, termasuk kawasan Lahan Per-

tanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Kami para kepala desa sepakat untuk tidak membangun karena keterbatasan lahan. Wilayah desa kami

didominasi lahan hijau," ujarnya.

Menurutnya, pembangunan gedung koperasi perlu mempertimbangkan kondisi tata ruang desa agar tidak mengurangi keberadaan lahan produktif maupun ruang hijau yang menjadi penopang kehidupan masyarakat.

Kondisi di Kecamatan Boyolangu menunjukkan adanya tantangan dalam pelaksanaan program nasional di tingkat desa. Di satu sisi, pemerintah mendorong percepatan pembentukan Koperasi Merah Putih sebagai penggerak ekonomi masyarakat. Di sisi lain, sejumlah desa harus mempertimbangkan aspek tata ruang dan kelestarian lingkungan sebelum merealisasikan

pembangunan fisik. Bagi tujuh desa yang belum mendirikan koperasi, keputusan tersebut bukan berarti menolak program pemerintah. Mereka memilih menunggu solusi yang dinilai lebih sesuai dengan kondisi wilayah, sehingga pembangunan dapat berjalan tanpa mengorbankan lahan hijau maupun kawasan pertanian yang dilindungi.

Perbedaan kondisi antarwilayah ini menjadi gambaran bahwa implementasi sebuah program nasional membutuhkan penyesuaian dengan karakteristik masing-masing daerah agar tujuan pembangunan ekonomi dapat tercapai tanpa mengabaikan keberlanjutan lingkungan. ● Mualimin

Aktifis GEPAK Dorong PAD dari Pajak dan Retribusi Belum Tersentuh

GARUT | SPJNEWS.ID - Kondisi keuangan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Garut yang tengah menghadapi defisit dinilai perlu disikapi dengan mencari sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang selama ini belum tergarap secara optimal.

Aktifis Gerakan Aplikasi Kebijakan (GEPAK), Amar Ma'ruf, mengatakan terdapat sejumlah faktor yang menyebabkan terjadinya efisiensi dan penurunan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Garut.

Salah satunya adalah pemotongan serta pengurangan dana Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat, seperti Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK), serta penyesuaian kebijakan nasional terkait efisiensi anggaran.

"Selain faktor lainnya, pemotongan Dana Transfer ke Daerah (TKD) oleh pemerintah pusat memangkas dana transfer secara signifikan. Dampaknya langsung terasa terhadap penurunan postur anggaran daerah Kabupaten Garut hingga ratusan miliar rupiah. Persoalannya di situ," ungkap Amar Ma'ruf, Sabtu (8/8/2026) lalu.

Menurutnya, kebijakan efisiensi nasional yang dikeluarkan pemerintah pusat, termasuk kebijakan mengenai efisiensi anggaran belanja, mengharuskan pemerintah daerah melakukan penyesuaian dan

pemangkasan sejumlah kegiatan operasional. Di sisi lain, kata Amar, Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari kemampuan daerah sendiri masih belum cukup besar untuk menutupi kekurangan anggaran akibat berkurangnya dana transfer dari pemerintah pusat.

"Ditambah lagi dengan beban belanja pegawai. Adanya penyesuaian aturan mengenai proporsi belanja pegawai turut memicu perlunya pengelolaan anggaran yang lebih ketat agar prioritas pembangunan tetap berjalan," tandasnya.

Dengan kondisi tersebut, Amar menilai Pemkab Garut, khususnya Bupati Garut Syakur Amin, perlu bekerja keras mencari solusi untuk meningkatkan PAD dengan menyisir seluruh sektor yang berpotensi menjadi sumber penerimaan daerah.

"Kami mendorong Pemda Garut untuk menyisir secara total sumber-sumber yang berpotensi menjadi PAD, dari sisi mana pun. Karena saat ini hampir semuanya sudah terkondisikan, maka diperlukan kreativitas dan keberanian dalam menggali potensi penerimaan baru," ujarnya.

Amar juga menyoroti keberadaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menjadi bagian dari pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Berdasarkan kajian dan informasi yang diperolehnya dari berbagai sumber,

Amar menyebut dapur SPPG yang bersifat nirlaba atau dikelola secara mandiri sebagai bagian dari program sosial pemerintah pada prinsipnya bukan merupakan objek Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas makanan dan minuman seperti halnya restoran komersial.

Namun demikian, menurutnya, keberadaan SPPG tetap menciptakan ekosistem ekonomi yang berpotensi memberikan kontribusi terhadap PAD secara tidak langsung.

"Memang dapur SPPG yang bersifat nirlaba tidak serta-merta menjadi objek pajak restoran. Tetapi ada potensi PAD tidak langsung yang lahir dari perputaran ekonomi di sekitar dapur tersebut," jelasnya.

Ia mencontohkan sejumlah sektor yang dapat dikaji oleh Pemkab Garut, antara lain transaksi turunan seperti pemanfaatan atau sewa lahan dan bangunan, pajak kendaraan yang berkaitan dengan aktivitas distribusi, serta retribusi pelayanan tertentu, termasuk kebersihan apabila memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain itu, kata Amar, keberadaan ribuan tenaga kerja yang terlibat dalam operasional SPPG juga menciptakan perputaran ekonomi yang cukup besar.

"Informasinya, di Garut ada sekitar 9.000 karyawan atau rela-



wan SPPG. Tentu aktivitas mereka menciptakan perputaran ekonomi. Dari sisi perpajakan, aspek pemotongan PPh Pasal 21 atas penghasilan tenaga kerja juga perlu dikaji sesuai ketentuan dan kewenangan masing-masing," katanya.

Menurut Amar, dampak ekonomi SPPG juga dapat dilihat dari sisi rantai pasok. Pembelian bahan pangan dari pasar resmi, pedagang maupun petani lokal berpotensi meningkatkan omzet usaha masyarakat dan memperkuat aktivitas ekonomi daerah.

"Ketika bahan baku pangan dibeli dari pelaku usaha dan petani lokal, terjadi peningkatan sirkulasi ekonomi. Omzet masyarakat meningkat dan pada akhirnya dapat memberikan dampak terhadap penerimaan daerah dari sektor-sek-

tor ekonomi yang memang menjadi objek pajak daerah," paparnya.

Atas kondisi tersebut, GEPAK mengusulkan kepada Bupati Garut dan DPRD Kabupaten Garut agar melakukan pembahasan khusus mengenai potensi pajak, pendapatan, dan retribusi daerah yang selama ini belum tersentuh atau belum tergarap secara maksimal.

Menurut Amar, pembahasan tersebut perlu melibatkan fungsi pengawasan DPRD, termasuk melalui rapat bersama dan evaluasi terhadap pengelolaan PAD di Kabupaten Garut. "Yang kami usulkan bukan sekadar mencari-cari objek pajak baru. Semuanya harus dikaji secara hukum dan ekonomi, kemudian dituangkan dalam regulasi yang jelas," tegasnya.

● Ajang Pendi

Jabar Unggul di FLS3N Pendidikan Khusus



BANDUNG | SPJNEWS - Jawa Barat (Jabar) memimpin klasemen sementara perolehan medali Festival Lomba Seni dan Sastra Siswa Nasional (FLS3N) Pendidikan Khusus Tingkat Nasional Tahun 2026.

Kontingen Jawa Barat telah mengoleksi lima medali emas, dua medali perak, dan satu medali perunggu. Raihan tersebut menempatkan Jabar di posisi pertama klasemen sementara.

Prestasi tersebut menjadi bukti kemampuan dan potensi peserta didik berkebutuhan khusus dalam mengembangkan bakat dan

kreatifitasnya melalui berbagai ajang kompetisi di tingkat nasional.

Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus Dinas Pendidikan (Disdik) Jabar, Firman Oktora, mengapresiasi capaian para peserta didik sekaligus kerja keras guru pembimbing dan sekolah dalam mempersiapkan kontingen Jawa Barat.

"Ini capaian luar biasa. Selamat kepada para pemenang dan Bapak/Ibu Guru yang sudah mendampingi dan membimbing dengan baik," ujar Firman saat menghadiri Penyerahan Penghargaan kepada Siswa SLB

di Aula Ki Hajar Dewantara, Kantor Disdik Jabar, Kota Bandung, Rabu (12/8/2026) lalu.

Menurut Firman, prestasi tersebut tidak diraih secara instan. Persiapan, latihan, pendampingan, serta dukungan dari sekolah menjadi bagian penting dalam mengantarkan peserta didik hingga mampu berkompetisi di tingkat nasional.

Ia menilai keberhasilan para siswa juga menunjukkan bahwa pendidikan khusus memiliki potensi besar untuk melahirkan peserta didik berprestasi apabila mendapatkan pembinaan dan kesempatan yang tepat.

"Terima kasih kepada sekolah yang sudah mendukung, guru-guru dan murid untuk berlatih, mengantarkan mereka sampai meraih prestasi di tingkat tertinggi," katanya.

Meski saat ini berada di posisi teratas, Firman mengingatkan bahwa klasemen perolehan medali tersebut masih bersifat sementara. Perolehan medali FLS3N tingkat nasional dihitung secara akumulatif dari seluruh jenjang pendidikan.

Sementara itu, pelaksanaan FLS3N untuk jenjang SD, SMP, SMA, dan SMK masih berlangsung. Dengan demikian, posisi Jawa Barat

masih berpotensi mengalami perubahan seiring bertambahnya hasil pertandingan dan perlombaan dari berbagai jenjang.

Di tingkat Jawa Barat, Disdik Jabar juga memberikan penghargaan kepada peserta didik yang meraih juara I, II, dan III dalam ajang FLS3N, Lomba Kompetensi Siswa (LKS), serta Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) Pendidikan Khusus Tahun 2026.

Pemberian penghargaan tersebut menjadi bentuk apresiasi atas kerja keras para siswa sekaligus dukungan bagi sekolah dan guru yang selama ini mendampingi proses pembinaan.

Firman mengatakan, dukungan sekolah menjadi salah satu faktor penting dalam perkembangan prestasi peserta didik. Lingkungan sekolah yang memberikan ruang untuk berlatih dan mengembangkan potensi dinilai dapat mendorong siswa lebih percaya diri dalam mengikuti berbagai kompetisi.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada para kepala sekolah serta Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I hingga XIII yang telah memberikan dukungan terhadap pembinaan peserta didik pendidikan khusus.

"Selamat juga kepada kepala sekolah yang sudah memberikan fasilitas dan dukungan terhadap kegiatan sehingga prestasi murid bisa terus berkembang," tuturnya.

Lebih lanjut, Firman berharap capaian yang diraih para siswa dapat menjadi motivasi bagi peserta didik lainnya untuk terus mengembangkan bakat dan kemampuan masing-masing. Prestasi tersebut juga diharapkan tidak berhenti pada ajang kompetisi, tetapi menjadi bagian dari proses pengembangan karakter, kemandirian, dan kepercayaan diri siswa.

Ia menambahkan, keberhasilan peserta didik pendidikan khusus merupakan hasil kerja bersama antara siswa, orang tua, guru, sekolah, dan pemerintah daerah. Kolaborasi tersebut perlu terus diperkuat agar pembinaan prestasi dapat berjalan secara berkelanjutan.

Dengan masih berlangsungnya rangkaian FLS3N tingkat nasional, Jawa Barat berpeluang menambah koleksi medali. Capaian sementara tersebut sekaligus menjadi motivasi bagi para peserta untuk memberikan kemampuan terbaik dan membawa nama Jawa Barat semakin berprestasi di tingkat nasional. ●SPJ-04

Perkuat Pendidikan Al-Qur'an, PGN-KB Gelar Bimtek Ratusan Guru Ngaji

KAB. BANDUNG | SPJNEWS- Hasil survei yang dipaparkan Prof. Dr. Udin mengungkap fakta yang menjadi perhatian serius. Tingkat keberhasilan pendidikan Baca Tulis Al-Qur'an (BTQ) bagi siswa SD dan SMP di Kabupaten Bandung baru mencapai 23,8 persen. Angka tersebut menjadi cermin sekaligus dasar untuk menyusun langkah konkret dalam memperkuat pembelajaran Al-Qur'an di kalangan generasi muda.

Merespons hasil survei tersebut, Persatuan Guru Ngaji Kabupaten Bandung (PGN-KB) bergerak cepat dengan mendorong pelaksanaan bimbingan teknis (bimtek) bagi para guru ngaji. Ketua PGN-KB, H. Uya Mulyana, menjelaskan bahwa kegiatan tersebut bertujuan memberikan pembekalan mengenai metode mengajarkan Al-Qur'an yang baik, efektif, dan mampu mempercepat kemampuan peserta didik dalam membaca serta menuis Al-Qur'an.

Bimtek dilaksanakan mulai Senin, 10 Agustus 2026, bertempat di Gedung Moch. Toha, Kabupaten Bandung. Mengingat luasnya wilayah Kabupaten Bandung, setiap desa dari sekitar 280 desa mengirimkan dua orang guru ngaji. Dengan demikian, jumlah peserta utama mencapai lebih dari 500 orang. Jika ditambah unsur pengurus, total peserta yang mengikuti kegiatan diperkirakan mencapai sekitar 600 orang.

Untuk menjaga ketertiban dan efektivitas kegiatan, pelaksanaan bimtek dibagi selama tiga hari dengan jumlah peserta sekitar 200 orang setiap harinya. Para peserta mendapatkan materi mengenai metode pembelajaran Al-Qur'an dan pendidikan akhlak. Pembekalan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas pengajaran sekaligus memperkuat fondasi pendidikan keagamaan bagi anak-anak di seluruh wilayah Kabupaten Bandung.



Bupati Bandung turut hadir dan memberikan materi mengenai upaya pencegahan serta penanganan kenakalan remaja. Materi tersebut diharapkan menjadi bekal bagi para guru ngaji dalam menanamkan pendidikan karakter dan akhlak kepada anak-anak, sehingga mereka tidak hanya memiliki

kemampuan intelektual, tetapi juga tumbuh sebagai generasi yang berakhlak dan berbudi pekerti luhur.

Selain itu, Dr. Masudi bersama tim memaparkan tata cara mengajarkan Al-Qur'an secara efektif. Metode yang disampaikan diharapkan dapat mempermudah sekaligus mempercepat kemampuan siswa

dalam membaca Al-Qur'an.

Sementara itu, Prof. Dr. Udin memaparkan hasil survei secara lebih mendalam sekaligus memberikan sejumlah rekomendasi dan langkah perbaikan untuk meningkatkan kemampuan baca tulis Al-Qur'an siswa di Kabupaten Bandung.

Kegiatan bimtek ini juga diharapkan dapat memperkuat pelaksanaan program Maghrib Mengaji di Kabupaten Bandung. Keberadaan guru ngaji yang memiliki tempat pembelajaran, baik di rumah, majelis maupun musala, dinilai menjadi salah satu kunci keberhasilan program tersebut.

Melalui kegiatan ini, PGN-KB berharap para guru ngaji semakin mampu menyelenggarakan pembelajaran Al-Qur'an dan pendidikan akhlak secara berkelanjutan. Dengan demikian, kemampuan baca tulis Al-Qur'an sekaligus pembentukan karakter anak-anak di Kabupaten Bandung dapat terus berkembang dan semakin berkualitas. ●SPJ-09

Pemkab Jombang Serahkan Beasiswa S1 kepada Tiga Puluh Mahasiswa Undar

JOMBANG | SPJNEWS.ID – Pemerintah Kabupaten Jombang menyerahkan beasiswa S1 kepada 30 mahasiswa Universitas Darul 'Ulum (Undar) Jombang dalam rangka memperluas akses pendidikan tinggi bagi putra-putri daerah dari keluarga kurang mampu.

Penyerahan beasiswa berlangsung di Aula Universitas Darul 'Ulum, Rabu (12/8/2026), dan dilakukan langsung oleh Bupati Jombang Warsubi, S.H., M.Si. Secara simbolis, penyerahan ditandai dengan pemakaian jas almamater Undar kepada salah satu mahasiswa penerima beasiswa. Program Beasiswa S1 Putra-Putri Daerah tersebut merupakan tahun kedua yang diselenggarakan Pemkab Jombang. Program ini ditujukan bagi warga Jombang yang memiliki prestasi akademik maupun nonakademik, tetapi berasal dari keluarga dengan kondisi ekonomi kurang mampu.

Bupati Jombang Warsubi mengatakan, program beasiswa menjadi bentuk nyata komitmen pemerintah daerah dalam membantu anak-anak Jombang memperoleh kesempatan menempuh pendidikan tinggi.

"Beasiswa ini menjadi fakta nyata di lapangan, bahwa cita-cita anak-anak Jombang untuk kuliah, mengembangkan diri, dan meraih

masa depan yang lebih baik, harus kita bantu wujudkan," ujar Warsubi.

Mahasiswa Diminta Jadi Penggerak Desa

Warsubi juga meminta para kepala desa yang menjadi wali asuh memberikan ruang kepada mahasiswa penerima beasiswa untuk belajar sekaligus berkontribusi di lingkungan desa masing-masing.

Menurutnya, para mahasiswa tersebut dapat dipersiapkan sebagai generasi muda yang memiliki kepedulian terhadap pembangunan daerah. "Jadikan mereka pioner pemuda desa yang dapat dilibatkan sebagai pemuda penggerak desa," katanya.

Ia juga berpesan agar para penerima beasiswa tidak menyia-nyiaikan kesempatan tersebut dengan belajar secara sungguh-sungguh serta menjaga nama baik keluarga dan Kabupaten Jombang.

Warsubi menegaskan, kontribusi kepada masyarakat tidak harus menunggu seseorang menjadi pejabat atau pemimpin. "Sejak dari bangku kuliah, kalian sudah bisa berbuat, berbagi ilmu, dan melakukan hal-hal baik yang bisa memberikan manfaat," pesannya.

Undar Apresiasi Program Beasiswa Pemkab Jombang

Rektor Universitas Darul 'Ulum,



Prof. Dr. H. Amir Maliki Abitolkha, M.Ag., menyampaikan apresiasi kepada Pemkab Jombang yang telah menjadi bapak asuh bagi 30 mahasiswa penerima beasiswa.

"Insyaallah empat tahun ke depan mereka akan berproses bersama di kampus yang kita cintai ini, dan harapan kita mereka akan menjadi orang-orang hebat yang bermanfaat untuk Jombang," ujarnya.

Program tersebut diharapkan memberikan kepastian akses pendidikan tinggi bagi mahasiswa dari keluarga kurang mampu sehingga persoalan biaya tidak menjadi penghambat dalam menyelesaikan studi.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang, Dra. Wor Windari, M.Si., menjelaskan

kan bahwa program Beasiswa S1 Putra-Putri Daerah tahun 2026 merupakan pelaksanaan tahun kedua.

Menurutnya, proses seleksi dilakukan secara ketat untuk memastikan penerima beasiswa benar-benar sesuai kriteria.

Selain verifikasi administrasi, tim melakukan home visit atau peninjauan langsung ke rumah calon penerima sebelum menetapkan 30 mahasiswa melalui rapat pleno.

"Kriteria ini ditetapkan sebagai bentuk kehadiran nyata Pemkab Jombang untuk memastikan bahwa kendala finansial tidak boleh menjadi penghalang bagi anak-anak kita yang berpotensi untuk meraih pendidikan tinggi," jelas Wor Windari.

Penerima Beasiswa: Kesem-

patan untuk Menginspirasi

Salah satu penerima beasiswa, Akhdan Asy Fakhani, menyampaikan terima kasih kepada Pemkab Jombang dan Universitas Darul 'Ulum atas dukungan pendidikan tersebut.

Ia berharap program beasiswa tidak hanya membantu 30 penerima menyelesaikan studi, tetapi juga menjadi motivasi bagi pelajar SMA/SMK di Jombang yang masih ragu melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi.

"Semoga ini akan menjadi motivasi adik-adik kami yang masih duduk di SMA/SMK dan merasa tidak memungkinkan kuliah, agar mencetuskan minat untuk kuliah dengan meraih beasiswa," ungkap Akhdan.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Wakil Bupati Jombang Gus Salmanudin, S.Ag., M.Pd., Sekdakab Jombang Agus Purnomo, S.H., M.Si., jajaran civitas akademika Undar, kepala OPD terkait, kepala desa sebagai wali asuh, mahasiswa penerima beasiswa, serta wali mahasiswa.

Penyerahan beasiswa yang dirangkaikan dengan diskusi pembangunan daerah tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat kolaborasi pemerintah, perguruan tinggi, dan masyarakat dalam menyiapkan generasi muda. ● Ratno

Inovasi Sekolah Harus Dilaksanakan, Bukan Sekadar Dipamerkan

CIAMIS | SPJNEWS - Inovasi tidak cukup berhenti sebagai karya yang dipamerkan. Hal tersebut disampaikan Kepala Bidang Pembinaan SMK Dinas Pendidikan Jawa Barat, Edy Purwanto saat menghadiri rangkaian HUT ke-62 SMKN 1 Ciamis, Selasa (11/8/2026) lalu.

Ia pun mendorong SMKN 1 Ciamis terus mengembangkan inovasi yang memberi manfaat nyata bagi sekolah dan masyarakat.

"Apa pun yang Bapak/Ibu lakukan, inovasi itu akan bermanfaat kalau dilakukan dan dilaksanakan. Jangan sampai dipamerkan. Kalau hanya dipamerkan, nanti hanya menjadi cerita," katanya.

Edy juga mengapresiasi perjalanan SMKN 1 Ciamis yang sela-

ma 62 tahun terus mengabdikan dan melayani masyarakat. Menurut Edy, perjalanan panjang SMKN 1 Ciamis merupakan modal untuk terus berkembang.

Ia menilai, semangat mengabdikan, menginspirasi, dan berbagi yang diusung SMKN 1 Ciamis perlu terus diwujudkan dalam berbagai program yang dapat dirasakan manfaatnya. Ia juga melihat sejumlah inovasi yang dikembangkan sekolah dapat menjadi inspirasi bagi sekolah lain.

Edy pun mengajak seluruh warga sekolah memandang berbagai persoalan yang muncul sebagai tantangan untuk menghasilkan perbaikan. "Jangan bicara tentang hambatan. Itu tantangan untuk ke depan jauh lebih baik," ujarnya.

Ia juga menekankan pentingnya peran generasi hari ini untuk melanjutkan capaian generasi sebelumnya. Ia berharap, SMKN 1 Ciamis terus mempertahankan semangat mengabdikan, menginspirasi, dan berbagi.

"Generasi hari ini harus jauh lebih baik, lebih hebat dibandingkan generasi sebelumnya," pungkasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Edy juga menekankan pentingnya kolaborasi antara sekolah, dunia usaha dan dunia industri (DUDI), serta berbagai pihak terkait dalam mengembangkan program pendidikan kejuruan. Menurut Edy, inovasi yang lahir dari lingkungan sekolah akan semakin kuat apabila didukung dengan kerja sama dan kebutuhan



nyata di masyarakat maupun dunia kerja.

Ia berharap berbagai program dan karya yang dihasilkan SMKN 1 Ciamis tidak hanya memberikan manfaat bagi internal sekolah, tetapi juga mampu menjadi bagian dari

solusi terhadap berbagai kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, keberadaan sekolah kejuruan dapat semakin dirasakan kontribusinya dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

● SPJ-19

Pemkab Bandung Genjot Normalisasi Sungai untuk Tekan Banjir

KAB. BANDUNG | SPJNEWS- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung terus memperkuat upaya penanganan banjir melalui program Pentahelix dengan melibatkan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah daerah, pemerintah desa, TNI-Polri, dunia usaha, hingga masyarakat.

Salah satu lokasi yang menjadi perhatian adalah Sungai Cikeruh di Desa Tegalluar, Kecamatan Bojongsoang. Bupati Bandung, Dadang Supriatna melakukan monitoring dan peninjauan langsung kegiatan normalisasi sungai tersebut, Jumat (7/8/2026) lalu.

Bupati Bandung, Dadang Supriatna mengatakan, program Pentahelix menjadi salah satu langkah konkret Pemkab Bandung dalam menangani persoalan sedimentasi sungai dan mengurangi risiko banjir di sejumlah wilayah.

Menurutnya, sedimentasi yang terdapat di sejumlah aliran sungai di Kabupaten Bandung masih cukup tinggi. Bahkan, berdasarkan hasil pemetaan, kebutuhan pengerukan sedimentasi mencapai sekitar 10 juta meter kubik.

"Kurang lebih 10 juta meter kubik. Ini bukan sedikit. Kita mem-



butuhkan alat berat, termasuk operasional dan sebagainya," ujar bupati yang akrab disapa KDS ini.

Ia menyampaikan apresiasi kepada Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Citarum yang telah mendukung pelaksanaan program Pentahelix. Namun, melihat besarnya kebutuhan pengerukan, KDS berharap dukungan anggaran dan peralatan dari pemerintah pusat dapat terus ditingkatkan.

"Saya terima kasih kepada BBWS Citarum. Walaupun anggaran terbatas, kalau bisa ditambah lagi supaya cepat selesai dan bisa

menyelesaikan sedimentasi," katanya.

Selain dukungan pemerintah pusat, KDS juga meminta Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui perangkat daerah terkait untuk turut memperkuat program tersebut.

Ia menegaskan, Pemkab Bandung tidak dapat bekerja sendiri dalam menangani persoalan banjir. Karena itu, kolaborasi lintas sektor menjadi kunci agar penanganan dapat dilakukan secara lebih cepat dan menyeluruh.

"Kita sudah menggerakkan

program Pentahelix. Ada 12 kecamatan yang kita masukkan ke dalam program Pentahelix. Saya minta PSDA juga turun tangan untuk terus membantu program ini," ujarnya.

KDS mengatakan, musim kemarau menjadi momentum penting untuk mempercepat pengerukan sungai dan anak-anak Sungai Citarum.

"Mumpung musim kemarau kita manfaatkan dalam rangka pengerukan sungai dan anak-anak Sungai Citarum. Insyaallah secara bertahap kita akan menyelesaikan, sehingga saat musim hujan tidak banyak lokasi yang tergenang banjir," tuturnya.

Dalam pelaksanaannya, program Pentahelix telah menyasar 12 kecamatan secara serentak. Sejumlah lokasi bahkan telah menyelesaikan pekerjaan normalisasi, di antaranya wilayah Panyadap, Kecamatan Solokanjeruk, dan Sungai Cisungalah.

"12 kecamatan serentak dilaksanakan program Pentahelix. Di antaranya yang sudah selesai daerah Panyadap, Solokanjeruk, Sungai Cisungalah. Cisungalah insyaallah sudah selesai, nanti kita akan resmikan," katanya.

Selain normalisasi sungai, Pemkab Bandung juga menyiapkan langkah penanganan banjir melalui pembangunan dua titik danau atau tampungan air di wilayah Tegalluar dan Sukamukti. KDS menyebut, desain teknis atau DED untuk pembangunan tersebut telah disiapkan BBWS.

"Kita akan upayakan, termasuk dua titik lokasi danau yang akan kita buat di wilayah Tegalluar dan Sukamukti. BBWS sudah membuat DED-nya dan insyaallah kita akan terus berkolaborasi," jelasnya.

Menurutnya, pembangunan tampungan air tersebut tidak hanya ditujukan untuk mengurangi risiko banjir, tetapi juga memiliki fungsi strategis dalam mendukung ketahanan pangan daerah.

Ia menyebut, program tersebut akan dikolaborasikan dengan berbagai program pemerintah pusat, termasuk Kementerian Pertanian dan Kementerian Pekerjaan Umum.

"Ini salah satu program terobosan untuk terus menjaga ketahanan pangan dan juga menstabilkan ketahanan pangan di wilayah Kabupaten Bandung," katanya.

● SPJ-03

Kasus Titik SPPG: Cermin Buram Kekuasaan di Tulungagung

SPJ NEWS.ID | TULUNGAGUNG- Tulungagung kembali diguncang riak besar dalam pusaran persoalan hukum. Dugaan penipuan dan penggelapan dana pembangunan SPPG senilai Rp1,5 miliar menyeret nama Plt Bupati Tulungagung, Ahmad Baharudin.

Laporan tersebut telah diterima oleh SPKT Polres Tulungagung, sebagaimana tertuang dalam ST-TLPM Nomor: STTLPM/92/VI/2026/SPKT tertanggal 26 Juni 2026.

Kuasa hukum pelapor, KH. Thoha Maksu, menyampaikan bahwa sejumlah saksi telah dipanggil untuk menjalani pemeriksaan.

Menurutnya, masih terdapat pihak yang belum diperiksa, termasuk Plt Bupati Tulungagung. Ia juga menyebut terdapat saksi yang sempat tidak memenuhi panggilan

penyidik sehingga petugas mendatangi kediaman yang bersangkutan.

Sementara itu, penyidik Polres Tulungagung, Sabil, mengatakan bahwa proses penanganan perkara masih berada pada tahap pemeriksaan saksi-saksi.

"Prosesnya masih dalam tahap pemeriksaan saksi-saksi," ujar Sabil, 11 Agustus 2026.

Perkembangan kasus ini pun menjadi perhatian publik. Dugaan perkara yang menyentuh lingkungan kekuasaan daerah tersebut tidak hanya menyangkut persoalan hukum, tetapi juga memunculkan pertanyaan mengenai transparansi, akuntabilitas, dan integritas penyelenggara pemerintahan.

Di tengah tuntutan masyarakat terhadap pemerintahan yang



bersih dan berintegritas, setiap dugaan penyalahgunaan kewenangan tentu perlu ditangani secara terbuka, objektif, dan berdasarkan bukti. Proses hukum juga harus

tetap menjunjung asas praduga tak bersalah sampai terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Hingga berita ini disiarkan, Plt

Bupati Tulungagung Ahmad Baharudin belum berhasil dikonfirmasi secara resmi terkait laporan dan perkembangan perkara tersebut.

● Mualimin

Dibalik Defisit Anggaran, Bupati Garut Genjot PAD dari Pajak Hotel dan Restoran



GARUT | SPJNEWS.ID – Di tengah kondisi defisit anggaran, Bupati Garut Abdusy Syukur Amin terus menggenjot peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), salah satunya melalui optimalisasi penerimaan pajak hotel dan restoran.

Hal tersebut disampaikan saat menghadiri Rapat Koordinasi Peningkatan Potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Garut yang digelar di Ruang Rapat Kantor Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Garut, Kecamatan Tarogong Kidul, Kamis (6/8/2026) lalu.

Dalam kesempatan itu, Ab-

dusy Syukur Amin menyoroti besarnya potensi penerimaan daerah dari sektor pajak hotel dan restoran seiring meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan ke berbagai destinasi wisata di Kabupaten Garut.

Menurutnya, peningkatan PAD akan dikembalikan kepada masyarakat dan pelaku usaha melalui pembangunan infrastruktur yang menunjang aktivitas ekonomi maupun sektor pariwisata.

"Hasil dari peningkatan PAD ini akan dikembalikan kepada masyarakat dan juga para pelaku usaha. Kita akan melakukan perbaikan jalan, lampu-lampu agar akses

menuju objek wisata semakin baik," ujar Abdusy Syukur Amin.

Ia menjelaskan, pembangunan jalan, penerangan, serta berbagai infrastruktur pendukung menuju kawasan wisata diharapkan dapat meningkatkan kenyamanan masyarakat, memperlancar mobilitas wisatawan, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Selain itu, Bupati Garut mengimbau seluruh wajib pajak agar terus meningkatkan kesadaran dan kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku. Menurutnya, keberhasilan pembangunan daerah tidak

terlepas dari kontribusi masyarakat melalui pembayaran pajak.

"Pembangunan ini sebagian besar dibiayai oleh pajak dari masyarakat. Karena itu, pengelolaannya harus dilakukan secara hati-hati, proporsional, dan adil," tegasnya.

Optimalisasi penerimaan pajak daerah dinilai menjadi salah satu langkah strategis Pemerintah Kabupaten Garut untuk memperkuat kapasitas fiskal di tengah tantangan defisit anggaran, sekaligus menjaga keberlanjutan program pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

● Ajang Pendi

Tambang Pasir Ilegal Brantas Jombang Diduga Masih Beroperasi

JOMBANG | SPJNEWS – Dugaan aktivitas penambangan pasir ilegal di aliran Sungai Brantas, tepatnya di wilayah Desa Gebangbunder, Kecamatan Plandaan, Kabupaten Jombang, kembali menjadi sorotan. Meski lokasi tersebut sebelumnya pernah menjadi sasaran operasi penertiban aparat kepolisian, aktivitas penyedotan pasir menggunakan mesin diesel masih terpantau berlangsung, Rabu (5/8/2026) lalu.

Berdasarkan pantauan di lapangan, sejumlah pekerja terlihat mengoperasikan mesin penyedot pasir di atas rakit sederhana. Material yang diambil dari dasar sungai dipindahkan ke bantaran sebelum dimuat ke truk yang telah menunggu untuk dibawa keluar lokasi.

Aktivitas berlangsung terbuka tanpa hambatan berarti. Beberapa titik penambangan masih aktif, sementara lalu lalang truk pengangkut pasir terus terjadi hingga siang hari.

Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai efektivitas pengawasan terhadap pemanfaatan Sungai Brantas yang memiliki fungsi strategis sebagai sumber air baku, irigasi, pengendali banjir, pembangkit listrik, serta penyangga kehidupan jutaan masyarakat di Jawa Timur.

Diduga Bertentangan dengan Regulasi Pertambangan

Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral

dan Batubara (Minerba), pasir sungai merupakan komoditas mineral bukan logam dan batuan yang pengelolaannya wajib memiliki perizinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan tersebut diperkuat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 yang mengatur bahwa kegiatan penambangan batuan harus dilakukan berdasarkan izin usaha yang sah.

Apabila terbukti melakukan penambangan tanpa izin, pelaku dapat dikenakan Pasal 158 UU Minerba dengan ancaman pidana penjara paling lama lima tahun dan denda hingga Rp100 miliar.

Selain aspek perizinan, pemanfaatan ruang sungai juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai, yang melarang aktivitas yang dapat merusak fungsi, alur, maupun bantaran sungai. Jika aktivitas tersebut mengakibatkan pencemaran atau kerusakan lingkungan, ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup juga dapat diterapkan sesuai hasil penyelidikan aparat penegak hukum.

Aktivas: Penegakan Hukum Jang-

gan Hanya di Atas Kertas
Aktivas lingkungan Perhimpunan Mitra Bumi (Pim-B), M. Djali, menilai masih beroperasinya aktivitas yang diduga ilegal tersebut menunjukkan perlunya penguatan



pengawasan dan penegakan hukum terhadap kejahatan lingkungan.

Menurutnya, persoalan ini bukan sekadar menyangkut pengambilan pasir, tetapi menyangkut keberlanjutan ekosistem Sungai Brantas yang menjadi penopang kehidupan masyarakat Jawa Timur.

"Kalau benar aktivitas itu tidak memiliki izin, maka negara sebenarnya sudah memiliki instrumen hukum yang sangat jelas. Yang menjadi pertanyaan adalah mengapa praktik seperti ini masih berlangsung secara terbuka. Jangan sampai hukum hanya tajam di atas kertas tetapi tumpul di lapangan," ujar M. Djali.

Ia mengingatkan bahwa eksploitasi pasir secara terus-menerus berpotensi mengubah morfologi sungai, mempercepat abrasi bantaran, merusak habitat biota air, meningkatkan sedimentasi di titik lain, hingga memperbesar risiko

longsor dan banjir.

"Sungai Brantas bukan sekadar tempat mengambil pasir. Ini adalah infrastruktur ekologis yang menopang kehidupan jutaan warga Jawa Timur. Kalau eksploitasi ilegal terus dibiarkan, biaya pemulihan lingkungan yang harus ditanggung negara akan jauh lebih besar daripada keuntungan ekonomi yang dinikmati segelintir orang," tegasnya.

M. Djali juga mendesak Polres Jombang, Polda Jawa Timur, Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus), Dinas ESDM Provinsi Jawa Timur, Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Brantas, serta Gakkum Kementerian Lingkungan Hidup untuk segera melakukan penyelidikan menyeluruh. "Bila ditemukan unsur pidana, proses hukum harus dilakukan tanpa pandang bulu. Penegakan hukum harus memberikan efek jera," katanya.

Kapolsek Plandaan: Akan Ditindaklanjuti

Untuk memperoleh konfirmasi, wartawan mendatangi Polsek Plandaan. Namun Kapolsek Plandaan tidak berada di kantor saat itu.

Melalui pesan singkat WhatsApp, AKP Solihin Budi Santoso, yang menjabat sebagai Kapolsek Plandaan sejak akhir Juni 2026, memberikan tanggapan singkat.

"Terima kasih informasinya dan akan ditindaklanjuti," tulis AKP Solihin.

Hingga berita ini diterbitkan, belum ada informasi resmi mengenai langkah lanjutan yang akan dilakukan aparat kepolisian terkait dugaan aktivitas penambangan tersebut.

Sementara itu, berdasarkan pantauan di lapangan pada hari yang sama, aktivitas penyedotan pasir menggunakan mesin diesel dan pengangkutan material menggunakan truk masih berlangsung.

Redaksi SPJNews.id masih berupaya memperoleh konfirmasi dari Dinas ESDM Provinsi Jawa Timur, Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Brantas, serta pihak-pihak yang melakukan aktivitas penambangan guna memastikan status perizinan dan legalitas kegiatan tersebut.

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, ruang hak jawab tetap dibuka agar seluruh pihak yang berkepentingan memperoleh kesempatan memberikan penjelasan secara proporsional. ● Ratno

Bersih Desa Bedoho Digelar Khidmat, Momentum Melestarikan Tradisi dan Budaya Leluhur

MADIUN | SPJNEWS.ID - Pemerintah Desa Bedoho, Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun, kembali menggelar tradisi Bersih Desa yang rutin dilaksanakan setiap bulan Agustus, bertepatan dengan Jumat Legi dalam penanggalan Jawa. Kegiatan yang berlangsung pada Jumat (7/8/2026) tersebut berjalan khidmat, meriah, dan penuh kebersamaan.

Acara dihadiri Kepala Desa Bedoho Priyanto beserta perangkat desa, Bhabinkamtibmas, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD), tokoh masyarakat, serta warga Desa Bedoho.

Tradisi Bersih Desa merupakan salah satu bentuk pelestarian budaya dan kearifan lokal yang hingga kini tetap dijaga masyarakat. Selain sebagai ungkapan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rezeki dan keselamatan, kegiatan ini juga menjadi momentum mempererat silaturahmi, menjaga kerukunan, serta menumbuhkan semangat gotong royong.

Suasana semakin kental dengan nuansa budaya Jawa melalui penampilan kelompok karawitan yang membawakan berbagai tembang Jawa dalam sajian uyon-uyon. Alunan gamelan yang berpadu dengan lantunan tembang Jawa mengiringi seluruh rangkaian kegiatan, menciptakan suasana yang teduh, khidmat, sekaligus menghibur. Kehadiran karawitan juga menjadi



bagian penting dalam upaya mengenalkan dan melestarikan seni tradisional Jawa kepada generasi muda.

Warga yang hadir tampak menikmati setiap sajian tembang sembari mengikuti rangkaian acara. Tradisi ini sekaligus menjadi ruang bagi masyarakat untuk berkumpul, mempererat hubungan sosial, dan menjaga semangat guyub rukun.

Dalam sambutannya, Kepala Desa Bedoho Priyanto mengatakan bahwa Bersih Desa merupakan tradisi turun-temurun yang memiliki makna penting bagi masyarakat.

"Bersih desa ini merupakan tradisi yang sudah dilaksanakan secara turun-temurun. Kita berharap kegiatan ini terus dilestarikan dan menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Desa Bedoho. Yang pal-

"Kegiatan seperti ini harus terus kita jaga. Jangan sampai perkembangan zaman membuat kita kehilangan jati diri dan budaya yang telah diwariskan para pendahulu."

ing penting, melalui kegiatan ini kita semakin guyub, rukun, dan kompak," ujar Priyanto.

Ia juga mengajak seluruh masyarakat untuk terus menjaga kebersamaan dan semangat gotong royong. Menurutnya, pembangunan desa tidak akan berjalan opti-



mal tanpa dukungan dan partisipasi seluruh elemen masyarakat.

Sementara itu, Ketua BPD Desa Bedoho, Dian Sandi Perdana, mengapresiasi pelaksanaan Bersih Desa yang secara konsisten digelar setiap tahun. Menurutnya, tradisi tersebut bukan sekadar kegiatan seremonial, melainkan memiliki nilai sosial dan budaya yang kuat.

"Kegiatan seperti ini harus terus kita jaga. Jangan sampai perkembangan zaman membuat kita kehilangan jati diri dan budaya yang telah diwariskan para pendahulu. Bersih desa juga menjadi kesempatan bagi kita untuk memperkuat persaudaraan dan kebersamaan," ungkap Dian Sandi Perdana.

Ia berharap penampilan karawitan dan uyon-uyon tembang Jawa tetap menjadi bagian dari setiap

pelaksanaan Bersih Desa sebagai wujud pelestarian seni dan budaya lokal.

Pelaksanaan Bersih Desa Bedoho menjadi gambaran kuatnya semangat kebersamaan masyarakat dalam menjaga tradisi leluhur. Pemerintah desa bersama BPD, LPMD, Bhabinkamtibmas, tokoh masyarakat, dan warga bergotong royong menyukseskan kegiatan yang telah menjadi bagian dari identitas Desa Bedoho.

Diiringi alunan karawitan dan lantunan uyon-uyon tembang Jawa, tradisi Bersih Desa tidak hanya menjadi ungkapan rasa syukur, tetapi juga menjadi sarana nguri-uri budaya Jawa, mempererat tali silaturahmi, serta memperkokoh semangat gotong royong di tengah masyarakat. ● Pughu Yuhana

Satlantas Polres Sampang Gencar Sosialisasikan Pemutihan Pajak Kendaraan



SAMPANG | SPJNEWS.ID - Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Sampang terus menggencarkan sosialisasi program baru Korlantas Polri bertajuk "Polantas Karib" yang merupakan singkatan dari Kemitraan, Aktif, Responsif, Intuitif, dan Berintegritas.

Sosialisasi tersebut dilakukan kepada masyarakat wajib pajak di Kantor Bersama (KB) Samsat Sampang, Senin (10/8/2026).

Kasatlantas Polres Sampang melalui Kanit Regident dan Identifikasi (KRI) Samsat Sampang menjelaskan, kegiatan sosialisasi Polantas Karib bertujuan memberikan edukasi secara langsung kepada

masyarakat mengenai pentingnya keselamatan berkendara di jalan raya.

Selain itu, kegiatan tersebut juga menjadi upaya untuk menanamkan kesadaran hukum dalam berlalu lintas, sehingga diharapkan dapat menekan angka kecelakaan lalu lintas, khususnya di wilayah hukum Polres Sampang.

"Keselamatan berkendara adalah kebutuhan bersama. Karena itu, melalui momen sosialisasi ini, kami tidak pernah lelah mengimbau masyarakat Sampang pada umumnya untuk senantiasa tertib berlalu lintas di jalan raya," ungkapnya, beberapa

waktu lalu.

Di akhir penyampaian, KRI Samsat Sampang juga mengingatkan masyarakat Kabupaten Sampang agar memanfaatkan momentum Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor yang diinisiasi oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

"Kami berharap masyarakat Kabupaten Sampang dapat memanfaatkan program pemutihan pajak dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur ini sebaik mungkin untuk menyelesaikan kewajiban administrasi kendaraannya tanpa perlu khawatir dikenakan sanksi denda," pungkasnya. ● Abdullah

ABAG Desak Pemkab Garut dan Kepolisian Bongkar Jaringan Pengedaran Obat Terlarang

GARUT | SPJNEWSID – Aliansi Bela Anak Bangsa (ABAG) mendesak pemberantas peredaran obat keras ilegal, narkoba, dan minuman keras (miras) di Kabupaten Garut. desakan tersebut disampaikan dalam audiensi bersama Pemerintah Kabupaten Garut yang berlangsung di Ruang Rapat Sekretariat Daerah Kabupaten Garut, Senin (10/8/2026).

Ketua ABAG, Hafid, mengatakan audiensi tersebut merupakan bentuk penyampaian aspirasi sekaligus respons terhadap keresahan masyarakat mengenai dugaan maraknya peredaran obat keras ilegal dan miras.

Menurut Hafid, persoalan tersebut tidak cukup diselesaikan hanya dengan menangkap pelaku atau pengedar di tingkat bawah. Pemberantasan, kata dia, harus dilakukan secara menyeluruh dengan membongkar rantai pasok hingga kepada pemasok dan pihak yang diduga berada di balik jaringan peredaran.

"Kami sebenarnya berharap seluruh unsur terkait dapat terlibat secara utuh. Karena persoalan ini merupakan mata rantai yang saling berkaitan. Kami mengapresiasi BNN dan kepolisian yang hadir, tetapi akan lebih komprehensif apabila seluruh unsur dapat terlibat," ujar Hafid.

"Ia menyoroti obat-obatan yang semestinya diperoleh melalui jalur resmi dan sesuai ketentuan, namun diduga dapat ditemukan serta diperjualbelikan di luar jalur resmi,

Kondisi tersebut, menurut Hafid, menjadi persoalan serius karena kelompok yang rentan terpapar adalah remaja dan pelajar.

Harga yang relatif terjangkau juga dinilai berpotensi membuat obat-obatan tersebut mudah dijangkau oleh anak-anak dan remaja. Hafid khawatir penyalahgunaan dapat bermula dari rasa ingin mencoba hingga berkembang menjadi



ketergantungan.

"Awalnya mungkin coba-coba, tetapi dari coba-coba bisa menjadi ketergantungan. Kalau generasi muda terus-terusan terpapar, kita khawatir terjadi kehilangan satu generasi apabila persoalan ini dibiarkan secara masif," katanya.

Hafid menegaskan, kehadiran ABAG bukan untuk menyudutkan pemerintah maupun aparat pen-

egak hukum. Sebaliknya, ABAG ingin mendorong kolaborasi seluruh pihak dalam melindungi generasi muda.

Salah satu tuntutan utama ABAG adalah agar aparat penegak hukum tidak berhenti pada penindakan terhadap pengedar di tingkat bawah. Hafid menilai, apabila pengedar hanya ditangkap sementara sumber pasokan tidak

dibongkar, maka peredaran akan terus berulang. "Kalau yang dibabat hanya pengedar di hilir, sementara rantai pasoknya tidak diputus, maka akan terus terjadi kucing-kucingan. Pengedar ditangkap, kemudian muncul lagi karena pasokan tetap masuk," ujarnya.

Karena itu, ABAG mendorong setiap kasus yang berhasil diungkap agar dikembangkan lebih jauh untuk mengetahui sumber pasokan, jaringan distribusi, hingga pihak yang diduga menjadi pengendali.

"Jangan berhenti di pengedar. Dari kasus yang sedang ditangani harus dikembangkan sampai kepada jaringan dan pemasoknya. Putus rantai pasoknya," tegas Hafid.

ABAG juga mendorong aparat mengoptimalkan langkah penyelidikan sesuai kewenangan dan ketentuan hukum yang berlaku, termasuk menelusuri informasi serta jejak digital yang berkaitan dengan jaringan peredaran. ● Ajang Pendi

Rp147 Juta untuk Smart TV SMAN Bareng Disorot...

<< DARI HALAMAN 1

Karena itu, jumlah unit, merek, tipe, harga satuan dan spesifikasi teknis lengkap belum dapat disimpulkan hanya berdasarkan data RUP.

Publik pun meminta informasi lebih rinci agar penggunaan anggaran pendidikan dapat dipahami dan diawasi secara objektif.

Bukan Tuduhan, tetapi Pertanyaan Publik

Mantan aktivis 1998, M.Djali, menilai pertanyaan mengenai pengadaan tersebut merupakan hal yang wajar karena anggaran berasal dari APBD. "Kalau anggarannya mencapai Rp147 juta, publik wajar bertanya. Barangnya apa, jumlahnya berapa, harga per unitnya berapa, dan apa urgensinya bagi sekolah harus dijelaskan secara terbuka," ujarnya.

Menurutnya, sorotan tersebut tidak boleh langsung dimaknai sebagai tuduhan adanya penyimpangan. "Ini bukan soal menuduh siapa-siapa. Justru kita ingin mencegah persoalan muncul di kemudian hari. Kalau semuanya wajar, transparan, dan harganya rasional, tentu tidak

ada alasan untuk ditutup-tutupi," katanya.

Ia juga menilai penggunaan metode E-purchasing tetap perlu diawasi karena masyarakat berhak mengetahui bagaimana anggaran publik digunakan sesuai ketentuan.

Pihak SMAN Bareng Belum Berikan Penjelasan Rinci

Untuk memperoleh klarifikasi, tim redaksi mendatangi SMAN Bareng pada Selasa (11/8/2026).

Wakil Kepala SMAN Bareng, Tri Wahjuni, mengaku belum mengetahui secara rinci mengenai rencana pengadaan Smart TV tersebut. Ia menyebut dirinya masih relatif baru bertugas dan pengadaan barang bukan merupakan bidang yang menjadi tanggung jawabnya.

"Saya juga baru pindah ke sini dan tidak tahu masalah pengadaan Smart Television itu, kan bukan bidang saya," ujarnya.

Pihak sekolah menyatakan akan menelusuri informasi tersebut kepada bagian yang menangani pengadaan dan meminta arahan kepala sekolah.

Hingga berita ini ditulis, belum

diperoleh penjelasan substantif mengenai jumlah unit, harga satuan, spesifikasi lengkap, lokasi pemasangan maupun dasar perhitungan pagu Rp147.384.000.

Transparansi Menjadi Kunci

Pengadaan yang tercantum dalam RUP belum dapat dianggap sebagai bukti bahwa telah terjadi pembelian ataupun penyimpangan anggaran.

Namun, keterbukaan informasi tetap penting karena dana yang digunakan bersumber dari APBD Provinsi Jawa Timur.

Publik pada dasarnya hanya ingin mengetahui hal-hal sederhana: berapa unit yang dibeli, berapa harga per unit, apa spesifikasinya, ditempatkan di mana, dan apa manfaatnya bagi siswa.

Jika seluruh proses dilakukan sesuai aturan dan harga yang diperoleh wajar, penjelasan terbuka justru dapat menjawab pertanyaan masyarakat. Sebab yang dipersoalkan bukan semata-mata televisinya, tetapi bagaimana uang publik digunakan untuk kepentingan pendidikan. ● Ratno

Polres Garut Dalam Penyalahgunaan BBM Bersubsidi

<< DARI HALAMAN 1

Berdasarkan keterangan tersangka, Pertalite bersubsidi itu dibeli di wilayah Kabupaten Tasikmalaya untuk kemudian dijual kembali di Kecamatan Cibalong, Kabupaten Garut. Polres Garut menegaskan akan terus menindak segala bentuk penyalahgunaan BBM bersubsidi agar penyalurannya tepat sasaran

dan tidak merugikan masyarakat. Polisi juga mengajak masyarakat ikut mengawasi distribusi BBM bersubsidi serta segera melapor jika menemukan dugaan penyalahgunaan. Masyarakat diimbau tidak melakukan pembelian, pengangkutan, maupun penjualan BBM bersubsidi yang bertentangan dengan ketentuan hukum. ● Ajang Pendi

Dedi Mulyadi Berantas Tramadol

<< DARI HALAMAN 1

Sebagai langkah konkret, Dedi menyatakan akan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum untuk menjalankan operasi pemberantasan hingga ke tingkat desa dan kelurahan.

Ia mengatakan koordinasi dengan Kapolda Jawa Barat akan dilakukan pada Jumat. Dalam operasi tersebut, Babinsa dan Bhabinkamtibmas akan dilibatkan untuk melakukan pengawasan serta penindakan di wilayah masing-masing.

Dedi menilai keberhasilan

memberantas tindak kriminal seperti begal dapat menjadi contoh bahwa rasa takut masyarakat bisa dihilangkan melalui perlawanan bersama.

Menurutnya, pendekatan serupa dapat diterapkan untuk menekan peredaran tramadol dan obat-obatan keras lainnya.

Ia berharap keberanian masyarakat dan tindakan tegas aparat dapat membuat para pengedar meninggalkan Jawa Barat dan menghentikan aktivitasnya di wilayah tersebut. ● SPJ-06

Curug Sanghyang Taraje Keindahan Alam Garut yang Bikin Takjub

GARUT | SPJNEWS - Bupati Garut Abdusy Syakur Amin mendorong pengembangan destinasi wisata Curug Sanghyang Taraje di Desa Pakenjeng, Kecamatan Pamulihan, Kabupaten Garut, Jawa Barat, agar semakin menarik dan mampu meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan.

Abdusy Syakur mengatakan, potensi wisata air terjun alami tersebut perlu dijaga, dirawat, sekaligus dikem-

bangkan secara berkelanjutan sehingga keberadaannya dapat memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar. "Ini kita harus pe-

lihara, jaga, dan kita kembangkan sehingga memberikan dampak yang baik buat masyarakat," kata Abdusy Syakur di Garut, Jumat (7/8/2026) lalu.

Sebelumnya, Bupati Garut bersama jajaran pemerintah daerah meninjau langsung kondisi Curug Sanghyang Taraje pada Sabtu (1/8). Dalam kunjungan tersebut, pemerintah berdialog dengan pengelola wisata untuk

mengetahui berbagai kebutuhan yang diperlukan dalam menunjang pengembangan kawasan.

Abdusy Syakur menyampaikan, pemerintah daerah akan melihat berbagai upaya yang dapat dilakukan, terutama dalam meningkatkan akses masyarakat menuju kawasan wisata tersebut.

"Barangkali apa yang bisa dikerjakan oleh Pemkab untuk meningkatkan akses bagi masyarakat di sini. Semoga ada realisasi dalam waktu tidak terlalu lama," ujarnya.

Menurutnya, Curug Sanghyang Taraje sudah cukup dikenal oleh wisatawan lokal dari Garut maupun daerah lain. Bahkan, sejumlah wisatawan mancanegara juga pernah berkunjung ke destinasi tersebut.

"Curug yang katanya salah satu yang tercantik di Jawa Barat, bahkan juga mungkin di Indonesia," katanya. Selain wisata alam, kawasan Curug Sanghyang Taraje dinilai memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai destinasi sport tourism. Pengembangan konsep tersebut diharapkan dapat menarik lebih

banyak wisatawan sekaligus memperluas manfaat ekonomi bagi masyarakat setempat.

Abdusy Syakur menegaskan bahwa sektor pariwisata memiliki peran strategis dalam menopang perekonomian daerah. Karena itu, pengembangan destinasi harus dibarengi dengan upaya menjaga kelestarian alam dan kebersihan lingkungan.

"Kalau bisa membantu ekonomi masyarakat akan lebih bagus, tetap harus dijaga kelestariannya," tuturnya.

Pemkab Garut, lanjut dia, akan mencari formulasi terbaik dalam pengembangan Curug Sanghyang Taraje dengan mempertimbangkan kapasitas anggaran daerah.

Pemerintah juga akan membangun kolaborasi dengan masyarakat dan pemerintah desa agar pengelolaan destinasi dapat dilakukan secara bersama-sama.

Selain itu, pemerintah daerah mendorong adanya dukungan anggaran dari pemerintah desa serta partisipasi aktif masyarakat, termasuk dalam memenuhi kewajiban pajak. Langkah tersebut dinilai penting agar pembiayaan pembangunan tidak sepenuhnya bergantung pada pemerintah kabupaten. "Di situ ada kolaborasi antara masyarakat, desa dengan pemerintah," pungkasnya.

● Ajang Pendi/Ads



PAD Pariwisata Kota Cirebon Capai Rp64,91 Miliar

CIREBON | SPJNEWS - Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kota Cirebon, Jawa Barat, mencatat Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pariwisata mencapai Rp64,91 miliar hingga Juli 2026.

Kepala Disbudpar Kota Cirebon Agus Sukmanjaya mengatakan, capaian tersebut setara dengan 50,16 persen dari target PAD sektor pariwisata tahun 2026 yang ditetapkan sebesar Rp129,40 miliar.

"Realisasi ini menunjukkan progres yang cukup baik karena sudah mencapai lebih dari separuh target tahunan," kata Agus di Cirebon, Rabu (12/8/2026) lalu.

Menurut Agus, penerimaan PAD sektor pariwisata berasal dari tiga sektor utama, yakni hotel,

restoran atau rumah makan, serta hiburan.

Sektor restoran atau rumah makan menjadi penyumbang terbesar dengan realisasi Rp47,97 miliar dari target Rp94,83 miliar. Angka tersebut mencapai 50,58 persen dari target penerimaan tahun ini.

Sementara itu, sektor hotel mencatat realisasi PAD sebesar Rp11,93 miliar dari target Rp24,57 miliar atau sekitar 48,57 persen.

Adapun sektor hiburan telah menyumbang Rp5,01 miliar dari target Rp10 miliar. Capaian tersebut setara dengan 50,06 persen dari target yang ditetapkan.

Agus menyampaikan, capaian PAD tersebut masih berpotensi meningkat karena periode

penerimaan tahun 2026 masih berlangsung. Optimalisasi penerimaan dari sektor pariwisata terus dilakukan untuk meningkatkan kontribusi terhadap pendapatan daerah.

"Masih ada peluang optimalisasi pada periode berikutnya sehingga capaian PAD sektor pariwisata dapat terus meningkat hingga akhir tahun," ujarnya.

Disbudpar Kota Cirebon terus mengoptimalkan potensi penerimaan dari sektor hotel, restoran atau rumah makan, dan hiburan guna mendukung pencapaian target PAD hingga penghujung 2026.

Di sisi lain, jumlah kunjungan wisatawan ke Kota Cirebon juga menunjukkan perkembangan positif. Hingga semester I-2026, ter-



catat sebanyak 2,67 juta wisatawan berkunjung ke Kota Cirebon.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 2,65 juta merupakan wisatawan nusantara, sedangkan 22.915 lainnya

merupakan wisatawan mancanegara. "Total kunjungan tersebut terdiri atas 2,65 juta wisatawan nusantara dan 22.915 wisatawan mancanegara," kata Agus. ● ADS